

## PEMBENTUKAN KARAKTER BERBASIS NILAI NILAI PANCASILA PADA GENERASI Z DARI PERSPEKTIF *COLLABORATIVE* *GOVERNANCE*

<sup>1</sup>Ni Putu Ari Setiawati, <sup>2</sup>Shri IGN Arya Wedakarna MWS, <sup>3</sup>I Made Sudiarkajaya, <sup>4</sup>I Gde Surya Kurniawan

Universitas Mahendradatta, Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar-Bali

[putuarisetiawati170175@gmail.com](mailto:putuarisetiawati170175@gmail.com), [awk.wedakarna198@gmail.com](mailto:awk.wedakarna198@gmail.com), [suryamozz@gmail.com](mailto:suryamozz@gmail.com), [kurniawan2022.sister@gmail.com](mailto:kurniawan2022.sister@gmail.com)

**Abstrak** - Generasi Z (Gen Z) dikenal sebagai generasi yang belum pernah merasakan dunia tanpa internet dan teknologi digital. Sebagai generasi yang paling terhubung secara digital, Gen Z berpikir, berinteraksi, dan bekerja secara berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Ciri-ciri Generasi Z seperti keterbukaan informasi, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan bekerja sama membuka peluang besar untuk membangun negara dengan ide-ide inovatif dan kreatif. Sebagai digital native, Gen Z memiliki keterampilan teknis yang tinggi, dapat melakukan banyak tugas, dan beradaptasi terhadap perubahan. Meski identitas Gen Z memiliki banyak aspek positif, namun tidak dapat dipungkiri juga terdapat banyak aspek negatif yang perlu diperhatikan, terutama jika menyangkut nilai-nilai Pancasila. Terpaparnya informasi yang tidak disaring di media sosial dapat menimbulkan informasi negatif yang melanggar nilai-nilai luhur bangsa. Meski Generasi Z memiliki banyak potensi positif yang bisa dikembangkan, namun ada juga beberapa aspek negatif yang perlu diwaspadai, khususnya terkait nilai-nilai Pancasila. Penting bagi masyarakat, pendidik, dan pemerintah untuk bersama-sama menerapkan strategi *collaborative governance* yang efektif guna memastikan generasi ini mewujudkan nilai-nilai luhur dan pengembangan keterampilan yang menjadi landasan bangsa Indonesia. Hal ini memungkinkan mereka menjadi generasi teknologi, namun juga menjadi generasi pemimpin dalam hal budaya dan tradisi. Penggabungan nilai-nilai Pancasila hendaknya dilakukan dalam konteks, memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, dan mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Pembinaan Pancasila juga harus dikemas secara positif dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Gen Z, Pancasila, kolaboratif

**Abstract** - Generation Z is the generation that has never experienced a world without the Internet and digital technology. As the most digitally connected generation, generation Z thinks, interacts, and works differently than the previous generation. Generation Z features such as openness of information, adaptability, and collaboration open up great opportunities to build a country with innovative and creative ideas. As a digital native, Gen Z has high

*technical skills, can do many tasks, and adapts to change. Although Gen Z identity has many positive aspects, there are also many negative aspects to clarity, especially concerning Pancasila's values. Although Generation Z has a lot of positive potential to develop, there are also some negative aspects to bear in mind, especially the values of Pancasila. It is important for the public, educators, and governments to jointly implement an effective collaborative governance strategy to ensure this generation realizes the values of integrity and the development of skills that are the foundation of the Indonesian nation. It enables them to be a generation of technology but also to be generations of leaders in terms of culture and tradition. Engagement of Pancasila's values should be done in context, provide coherence in everyday life, and encourage participation in social and social activities. Pancasila construction should also be packed positively and relevant in everyday life.*

*Keywords: Gen Z, Pancasila, collaborative governance*

## PENDAHULUAN

Generasi Z, atau sering disebut sebagai Gen Z, adalah kelompok demografi yang lahir dari akhir 1990-an hingga awal 2010-an. Mereka dikenal sebagai generasi yang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet dan teknologi digital. Menurut (Turner, 2015), Gen Z adalah generasi yang sangat tergantung pada teknologi untuk komunikasi, pendidikan, dan hiburan. Mereka merupakan generasi yang sangat akrab dengan media sosial, ponsel pintar, dan berbagai perangkat teknologi lainnya yang memudahkan akses informasi secara instan. Sebagai generasi yang paling terhubung secara digital, Gen Z memiliki cara berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang berbeda dari generasi sebelumnya.

### Karakteristik Generasi Z

Karakteristiknya yang unik dan berbeda dengan generasi sebelumnya, memunculkan potensi dan sekaligus tantangan dalam menjaga kelestarian nilai-nilai Pancasila. Karakteristik khas Generasi Z, seperti keterbukaan terhadap informasi, kemampuan beradaptasi yang tinggi, dan kecenderungan untuk berkolaborasi, membuka peluang besar untuk memajukan bangsa dengan ide-ide kreatif dan inovatif.

Mereka terbiasa dengan dunia digital, memungkinkan mereka untuk menjadi agen perubahan yang gesit dan responsif terhadap isu-isu terkini.

Generasi Z ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan teknologi. Sebagai *digital native*, mereka memiliki kemampuan teknis yang tinggi, mampu melakukan *multitask* dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Generasi ini juga dikenal sebagai generasi yang inklusif, terbuka terhadap keberagaman, sadar sosial, dan sangat peduli terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim dan keadilan sosial (Dimock, 2019).

Banyak sisi positif dari identitas Gen Z, namun tidak dapat dipungkiri juga banyak sisi negatif yang perlu diperhatikan, terutama jika menyangkut nilai-nilai Pancasila. Pancasila menekankan lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagai landasan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi standar moral bagi seluruh warga Indonesia dalam kehidupannya.

## Potensi Pelempasan Karakter dari Nilai-Nilai Pancasila

Karakteristik ini juga dapat memicu kemerosotan nilai-nilai Pancasila jika tidak dikaji dan diarahkan dengan tepat. Paparan informasi yang tidak terfilter di media sosial dapat menjerumuskan mereka ke dalam konten negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kecenderungan individualisme dan pragmatisme juga dapat mengikis rasa persatuan dan gotong royong yang menjadi fondasi Pancasila.

Karakteristik Gen Z yang berpotensi melempas dari nilai-nilai Pancasila, antara lain:

1. Kecenderungan dalam menggunakan teknologi membuat mereka cenderung individualistis dan kurang terlibat dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Menurut (Schmitt, 2024) generasi ini menunjukkan penurunan dalam aktivitas sosial tradisional, seperti berkumpul dengan teman-teman di kehidupan nyata.
2. Kecanduan media sosial dan informasi instan mengurangi kemampuan untuk berpikir kritis dan berefleksi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan penghayatan yang mendalam terhadap nilai-nilai inti Pancasila. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dapat mengakibatkan tindakan yang kurang memiliki rasa kasih sayang dan pertimbangan terhadap sesama.
3. Sifat mereka yang sangat adaptif dan terbuka terhadap perubahan dapat membuat mereka mudah terpengaruh oleh budaya asing yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-

nilai Pancasila. Globalisasi dan arus informasi yang cepat dapat membawa pengaruh budaya yang berpotensi berbenturan dengan identitas nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

4. Kemampuan mengakses berbagai informasi di internet tanpa melakukan filter yang baik dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang moralitas dan nilai-nilai nasional. Misalnya, budaya "*cancel culture*" yang muncul di media sosial dapat bertentangan dengan prinsip musyawarah dan mufakat yang digariskan dalam Pancasila (Rebi et. al, 2020). Agar Generasi Z tetap dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka di tengah perkembangan teknologi yang pesat, tantangan ini harus diatasi dengan pendekatan yang bijak.

Generasi Z memiliki banyak potensi positif yang dapat dikembangkan, namun juga memiliki beberapa sisi negatif yang perlu diwaspadai, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Penting bagi masyarakat, pendidik, dan pemerintah secara kolaboratif untuk bekerja sama dalam menerapkan strategi yang efektif guna memastikan bahwa generasi ini dapat mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Dengan demikian, mereka dapat menjadi generasi yang tidak hanya maju dalam teknologi, tetapi juga luhur dalam moral dan etika.

Penanaman nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara kontekstual, dengan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka dan mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial

dan kemasyarakatan. Pendidikan Pancasila juga harus dikemas dengan cara yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

## KAJIAN PUSTAKA

### Sejarah Singkat Pancasila dan Penetapannya sebagai Ideologi Bangsa

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejarah Pancasila tak lepas dari semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan serta hasrat untuk merdeka dan hidup bersatu dalam keberagaman.

Awal mula perumusan Pancasila terjadi pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Jepang mendirikan “*Dokuritsu Junbi Cosakai*” atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Salah satu sidang penting BPUPKI adalah sidang yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Dr. Ir. Soekarno, sebagai salah satu anggota badan, menyampaikan gagasan yang kemudian dikenal sebagai Pancasila pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya Dr. Ir. Soekarno mengusulkan lima asas dasar negara, yang kemudian oleh ahli bahasa Indonesia, Mohammad Yamin, dinamakan “Pancasila” yang berasal dari kata “*panca*”

(lima) dan “*sila*” (prinsip atau asas) (Wreksosuhardjo, 2005).

Konsep Pancasila saat itu belum final dan dalam proses penyempurnaannya. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyusun Piagam Jakarta yang memuat rumusan Pancasila, kemudian pada 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Sardiman & Amurwani, 2017).

Pancasila kemudian ditetapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia karena memiliki sejumlah alasan prinsipil. Pertama, Pancasila mampu mengakomodasi kemajemukan dan pluralitas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan golongan. Asas Persatuan Indonesia dalam Pancasila menggambarkan pentingnya persatuan di tengah keberagaman tersebut (Notonagoro, 1975). Kedua, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur tradisi dan budaya masyarakat Indonesia, seperti gotong royong (merakyat), keadilan sosial, dan ketuhanan. Nilai-nilai tersebut mencerminkan falsafah dan pandangan hidup luhur bangsa Indonesia (Ronto, 2012). Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara menumbuhkan semangat demokrasi yang beradab dan berkeadilan melalui permusyawaratan perwakilan, bukan semata-mata melalui kekuasaan mayoritas (Dewantara et.al, 2019).

Pancasila tetap menjadi pedoman dan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sepanjang masa. Pancasila mampu mengatasi masalah dan tantangan masa kini bagi bangsa Indonesia dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pancasila masih relevan sebagai landasan moral dan etika untuk

menjalankan kehidupan berbangsa yang adil, makmur, dan sejahtera di tengah globalisasi yang semakin mencabar batas-batas budaya dan identitas.

### **Pemerintahan Kolaboratif (*Collaboratif Governance*)**

Dalam administrasi publik, konsep kolaboratif pemerintahan telah menjadi sangat penting, terutama sejak munculnya paradigma *New Public Management* (NPM). Paradigma NPM memasukkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah. Tata kelola kolaboratif, adalah elemen penting yang mendorong berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

*New Public Management* muncul sebagai tanggapan atas kelemahan model birokrasi tradisional, yang sering dianggap lamban, tidak efisien, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut (Hood, 1991) peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan bisnis, desentralisasi, penerapan indikator kinerja, dan kompetisi pasar adalah semua strategi yang digabungkan dalam NPM. Prinsip-prinsip NPM dan kolaboratif pemerintahan sama-sama menekankan transparansi, keterlibatan berbagai aktor, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Konsep pemerintahan kolaboratif menjadi semakin populer sejak 2019. *Collaborative governance*, menurut (Emerson et.al, 2019) melibatkan orang-orang dari berbagai sektor pemerintah, swasta, dan non-pemerintah dalam kerangka kerja sama untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Proses ini meningkatkan

legitimasi keputusan dan kualitas layanan publik.

Dalam NPM, pemerintahan kolaboratif didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain: 1) Keterlibatan *multi-stakeholder*, selain pemerintah, banyak pihak yang berkepentingan lainnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan, 2) Kemitraan, terjalinnya hubungan kerja sama antara pemerintah dan entitas lain untuk mencapai tujuan bersama, 3) Desentralisasi, aktor lokal diberi kewenangan untuk meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab, 4) Jaringan, *stakeholder* membuat jaringan untuk berkomunikasi dan bekerja sama, dan 5) Kapasitas, meningkatkan kemampuan para pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008)

Dengan meningkatnya kompleksitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern, pemerintahan kolaboratif telah berkembang. Misalnya, banyak pihak harus bekerja sama untuk memecahkan masalah seperti transformasi digital, keterbukaan data, dan perubahan iklim. Menurut (Tores & Pina, 2020) kerja sama antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dapat menghasilkan solusi kreatif dan efektif untuk masalah.

Di era digital, kemajuan teknologi juga membantu kerja sama pemerintahan. Platform kolaborasi, media sosial, dan teknologi informasi menjadi alat penting yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan berpartisipasi secara aktif dan secara real-time. (Mergel, 2021) mengatakan bahwa teknologi digital telah memungkinkan lebih banyak

orang untuk mengakses data dan informasi, yang telah menghasilkan lebih banyak transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, institusi pendidikan dan penelitian semakin penting untuk mendukung pemerintahan yang bekerja sama. Institusi-institusi ini memiliki kemampuan untuk menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence based decision making*).

Dengan meningkatnya kompleksitas masalah publik dan kemajuan teknologi, kolaborasi antara berbagai sektor menjadi penting untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. *Collaborative governance* menjadi elemen penting dalam administrasi publik modern yang direkayasa oleh prinsip-prinsip *New Public Management*. Kerja sama pemerintahan yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Praktik *Collaborative Governace* dalam implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Generasi Z.**

Pada era yang penuh dengan dinamika globalisasi seperti saat ini, sangat penting bagi Generasi Z di Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu cara yang efektif untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan relevan di kalangan generasi muda adalah dengan menerapkannya melalui praktik kerja sama pemerintahan. Dalam konteks ini, kerja sama pemerintahan mengacu pada proses pelaksanaan

kebijakan dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil.

### **Bentuk *Collaborative Governance***

#### 1. Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah

Pendidikan karakter yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia. Untuk melaksanakan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yayasan-yayasan pendidikan, dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pendidikan harus bekerja sama (Adi, 2020). Misalnya, Gerakan Literasi Nasional, yang bekerja sama dengan banyak pihak untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak, memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum sekolah.

#### 2. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Salah satu cara nyata untuk menunjukkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, "Persatuan Indonesia" adalah melalui tindakan seperti gotong royong atau kerja bakti di lingkungan masyarakat (Yasmin, 2023). Seringkali, karang taruna bekerja sama dengan pemerintah setempat dan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk melakukan kegiatan ini.

#### 3. Forum Dialog dan Diskusi Publik

Implementasi yang signifikan lainnya adalah percakapan dan diskusi yang melibatkan generasi muda. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), universitas, dan kelompok pemuda melakukan acara ini (Kemdikbud, 2019). Melalui forum ini, Generasi Z dapat berpartisipasi dalam diskusi tentang masalah kebangsaan, membantu mereka memahami dan menginternalisasi prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

### Aktor-Aktor yang Telibat

1. Pemerintah  
Pemerintah pada berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah, memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan kerja sama. Dua pihak utama yang bertanggung jawab atas program internalisasi dan pendidikan Pancasila adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kemdikbud, 2019).
2. Sektor Swasta  
Perusahaan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang mendukung nilai-nilai Pancasila melalui program CSR mereka. Misalnya, perusahaan teknologi mengadakan pelatihan dan seminar untuk anak muda tentang cara menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan etis (Suryadi, 2019).
3. Masyarakat Sipil  
Organisasi non-pemerintah, komunitas, dan institusi pendidikan sangat penting dalam mendorong program berbasis masyarakat (BPIP, 2021). Mereka seringkali berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Pancasila.
4. Institusi Pendidikan  
Universitas juga merupakan tempat penting untuk menerapkan *collaborative governance* (BPIP, 2021). Institusi ini memastikan nilai-nilai Pancasila diseminasi dengan baik ke generasi muda melalui pengembangan kurikulum yang berkelanjutan dan program pendidikan karakter.

### SIMPULAN DAN SARAN

Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, praktik pemerintahan kolaboratif menunjukkan bahwa kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan lebih penting daripada satu pihak. Generasi Z membutuhkan pemahaman yang mendalam dan praktis tentang Pancasila sebagai pedoman hidup yang relevan di tengah tantangan yang dihadapi di era globalisasi. Berbagai pihak dapat bekerja sama secara sinergis untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila secara efektif dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2020). *Pendidikan Karakter di Era Milenial: Persepsi dan Implementasi*. Prenada Media.
- Ansell, C., Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4). <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- BPIP. (2021). *Laporan Tahunan BPIP*. BPIP.
- Dewantara, J.A., Suhendar, I, Rosyid, R., Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as ideology and characteristics civic education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29103/ijevs.v1i5.1617>
- Dimock, M. (2019). *Defining generations: where millennials end and generations Z begins*. Pew Research Center.

- <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/>
- Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh, S. (2019). Integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 29(1), 1–21.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons. *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Kemdikbud. (2019). *Kebijakan dan Program Penguatan Pendidikan Karakter*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mergel, I. (2021). Digital transformation in the public sector: a global perspective. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 8(2), 150–165.
- Notonagoro. (1975). *Pncasila Secara Ilmiah Populer* (Cetakan ke). Pantjuran Tudjuh.  
<https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=7980>
- Rebi et.al. (2020). *Monograf Hukum Pancasila dan Globalisasi* (E. Rifai (Ed.); Cetakan Pe). Pusaka Media.  
<http://repository.lppm.unila.ac.id/50993/1/hk.panca.pdf>
- Ronto. (2012). *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara* (Cetakan I). Balai Pustaka.
- Sardiman, A.M. Amurwani, D. L. (2017). *Sejarah Indonesia* (Edisi Revi). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Schmitt, M. (2024). iGen: Why Today's Super-Connected Kids are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood: and What That Means for the Rest of Us. By Jean M. Twenge: A Book Review. *TAFCS Research Journal*, 10(1), 41–54.  
[https://www.researchgate.net/publication/378128957\\_iGen\\_Why\\_Today's\\_Super-Connected\\_Kids\\_are\\_Growing\\_Up\\_Less\\_Rebellious\\_More\\_Tolerant\\_Less\\_Happy-and\\_Completely\\_Unprepared\\_for\\_Adulthood\\_and\\_What\\_That\\_Means\\_for\\_the\\_Rest\\_of\\_Us\\_A\\_Book\\_Review](https://www.researchgate.net/publication/378128957_iGen_Why_Today's_Super-Connected_Kids_are_Growing_Up_Less_Rebellious_More_Tolerant_Less_Happy-and_Completely_Unprepared_for_Adulthood_and_What_That_Means_for_the_Rest_of_Us_A_Book_Review)
- Suryadi, T. (2019). Peran CSR dalam penguatan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Sosial*, 5(1), 55–70.
- Tores, L., Pina, V. (2020). Public-sector reforms and the role of collaborative governance in the twenty first century. *Review of Public Administration*, 8(2), 150–165.
- Turner, A. (2015). Generation Z: Technology and social interest. *The Journal of Individual Psychology*, 71(2), 103–113.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1353/jip.2015.0021>
- Wreksosuhardjo, S. (2005). *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Andi.



<https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/jdmrc#:~:text=Ilmu Pancasila>

Yuridis Kenegaraan adalah, sebagai

materi maupun sebagai metode.

Yasmin, R. A. (2023). Implementasi

Pancasila di Kalangan Generasi Z:

Studi Kasus Kota Bandung. *Seminar*

*Nasional Pendidikan, II*, 89–104.